

**IMPLEMENTASI PASAL 38 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 28  
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERKAIT PERLINDUNGAN  
EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL TARI LEGONG PENGELEB DI  
DESA MENYALI**

Oleh

**Gede Eka Sidi Artama, NIM 2214101073**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Tari Legong Pengeleb di Desa Menyali, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi non-partisipan dan wawancara mendalam menggunakan teknik *purposive sampling* terhadap keluarga pewaris, penari, pengurus sanggar, Kelian Adat Desa Menyali, serta informan dari BRIDA dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Data tersebut didukung oleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewajiban negara untuk menginventarisasi, menjaga, dan memelihara Tari Legong Pengeleb belum optimal dan berada pada tahap kemajuan parsial. Meskipun telah dilakukan pendataan administratif lokal, tari ini belum terdaftar dalam database nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di DJKI, sehingga belum memiliki legitimasi formal sebagai Hak Kekayaan Intelektual yang terlindungi sepenuhnya. Faktor penghambat utama meliputi faktor hukum, yaitu ketiadaan Peraturan Daerah khusus di Kabupaten Buleleng, serta faktor non-hukum yang mencakup rendahnya kesadaran hukum masyarakat, hambatan birokrasi, keterbatasan anggaran daerah yang insidental, dan minimnya regenerasi akibat arus digitalisasi. Simpulan penelitian menegaskan perlunya sinergi regulasi daerah dan pendaftaran formal KIK untuk memperkuat perlindungan hukum dan menjaga kedaulatan budaya Desa Menyali dari risiko klaim pihak luar.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Ekspresi Budaya Tradisional, Tari Legong Pengeleb.

**IMPLEMENTATION OF ARTICLE 38 PARAGRAPH (2) OF LAW NUMBER  
28 OF 2014 CONCERNING COPYRIGHT RELATED TO THE  
PROTECTION OF TRADITIONAL CULTURAL EXPRESSIONS OF THE  
LEGONG PENGELEB DANCE IN MENYALI VILLAGE**

**By**

**Gede Eka Sidi Artama, NIM 2214101073**

**Law Study Program**

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the implementation of Article 38 paragraph (2) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright related to the protection of Traditional Cultural Expressions (NRE) of the Legong Pengeleb Dance in Menyali Village, as well as identify inhibiting factors in its implementation. The research method used is an empirical law that is descriptive with a qualitative approach to examine the gap between *das sollen* and *das sein*. Primary data were obtained directly through non-participant observation and in-depth interviews using purposive sampling techniques on the heir's families, dancers, studio administrators, Kelian Adat of Menyali Village, as well as informants from BRIDA and the Buleleng Regency Cultural Office. The data is supported by secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through document studies. The results of the study show that the implementation of the state's obligation to inventory, maintain, and maintain the Legong Pengeleb Dance is not optimal and is at the stage of partial progress. Although local administrative data collection has been carried out, this dance has not been registered in the national database of Communal Intellectual Property (KIK) at the DJKI, so it does not have formal legitimacy as a fully protected Intellectual Property Right. The main inhibiting factors include legal factors, namely the absence of special Regional Regulations in Buleleng Regency, as well as non-legal factors that include low public legal awareness, bureaucratic obstacles, incidental regional budget limitations, and lack of regeneration due to digitalization flows. The conclusion of the study emphasizes the need for synergy between regional regulations and formal registration of KIK to strengthen legal protection and maintain the cultural sovereignty of Menyali Village from the risk of external claims.*

**Keywords:** *Legal Protection, Traditional Cultural Expressions, Legong Pengeleb Dance.*